

Betapa Seriusnya Profesi Wartawan

KEPERGIAN Fuad Muhammad Syafruddin merupakan kehilangan yang berlapis-lapis bagi berbagai pihak. Mulai dari keluarganya, kerabat kerjanya sehari-hari di Harian *Bernas*, hingga rekan seprofesi di seluruh tanah air. Bahkan bagi kita semua sebagai makhluk yang menjunjung tinggi peradaban di atas kekerasan dan hukum rimba.

Nasib yang dialami almarhum bukanlah yang pertama di Indonesia. Bahkan belum sebulan ini telah berulang kali terdengar laporan tentang pennganiayaan terhadap wartawan.

Mereka bukan saja dianaya sebagai individu dalam kaitan yang samar-samar dengan profesi. Ada yang dianaya pada saat dan di tempat menjalankan profesi resminya.

Karena itu sudah sepantasnya kita bertanya, dan mencoba berpikir lebih keras: mengapa semua ini bisa terjadi? Apakah kejadian-kejadian itu masih akan berlanjut?

Kita tak ingin pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Benarkah tak ada sedikit pun yang dapat kita upayakan selain menyesali dan memprihatinkan sesudah korban-korban baru berjatuhan?

Analisis oleh Ariel Heryanto

Tentu saja pertanyaan-pertanyaan begini sudah berkali-kali ditanyakan orang dan dibahas. Saya sendiri tak berpretensi punya jawabnya. Jelas kita membutuhkan sebuah gerakan yang praksis dapat dilakukan secara resmi untuk paling sedikit menghindarkan, jika bukan melenyapkan sumber-sumber penyakitnya.

Tapi sementara hal itu belum menjadi kenyataan, sebuah pemahaman yang tepat akan gejala itu perlu diuji-ulang, dan dipertajam terus.

Kasus paling belakangan dari Yogyakarta ini mengingatkan kita tentang betapa seriusnya profesi kewartawan di tanah air. Agak menyesatkan bila kasus Syafruddin dibahas dalam rubrik "budaya kekerasan" atau "hukum dan apparatur keamanan" secara abstrak atau dalam lingkup seluas-luasnya tanpa batas.

Kita tahu tak semua profesi mengalami perlakuan kekerasan bertubi-tubi seperti halnya profesi wartawan. Dalam konteks sekarang sulit membayangkan anggota DPR/MPR kita diculik, atau dianaya ka-

rena profesiya sebagai parlemen.

Sulit membayangkan ada seorang ahli perpustakaan, atau ahli tentang pra-sejarah, atau ningrat keraton terlibat dalam kekerasan politik semata-mata karena profesiya.

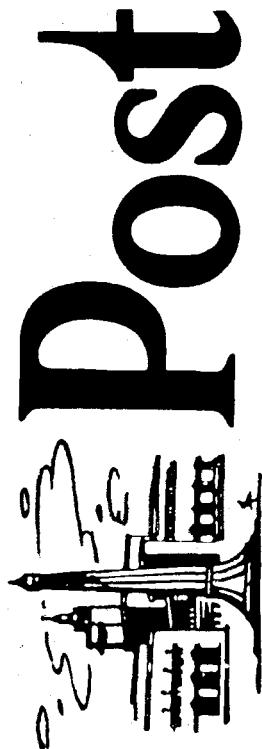
Bahkan kita perlu memperspit lingkup masalah dan mempertajam fokus dengan menyadari, tidak di semua masyarakat dan tidak di semua zaman, profesi kewartawanan itu diincar pelaku tindak kekerasan.

Tak sulit bagi semua orang awam untuk menyadari betapa seriusnya profesi wartawan di Indonesia saat ini. Bagi sebagian lain, istilah "serius" bisa diganti dengan "seram".

Wartawan Indonesia menempati kedudukan yang sangat strategis di samping beberapa profesi "kelas menengah kota" lain dalam proses perubahan besar-besaran yang tengah melanda masyarakat, yakni perubahan dari bangsa-negara birokratik menjadi kapitalis industrial.

Kedudukan dan kewibawaan kaum jurnalis Indonesia dapat diukur dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kepada siapa buruh, (Bersambung ke hlm. 9 kolom 7)

Surabaya Post



Senin, 26 Agustus 1996

Post

Tahun XLIV No. 229

Betapa...

(Sambungan dari halaman 1)

petani, pegawai tanpa rumah, penganggur, korban fitnah, korban perampukan, narapidana, kaum minoritas dapat mengharapkan perlindungan yang dijanjikan konstitusi? Kepada kepolisian? Pengadilan? Pimpinan agama? Partai politik? Organisasi kaum cendekiawan? Parlemen? Atau preman?

Media massa menjadi salah satu benteng terakhir bagi rakyat untuk mengadukan nasibnya di saat mereka merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak yang lebih berkuasa.

Para jurnalis Indonesia masih memiliki kredibilitas, kepercayaan atau mandat tinggi dari bangsa. Kehormatan semacam ini rasanya semakin sulit ditemukan pada lembaga-lembaga lain, baik yang negeri maupun swasta.

Mungkin pengaduan rakyat jelata itu tidak secara langsung, misalnya lewat surat terbuka dalam pers. Rakyat pedesaan biasanya tidak mengadakan konferensi pers bila merasa diintimidasi, diperlakukan oleh media massa yang dikuasai kaum terdidik di kota. Namun hambaran ini bukannya tak dapat diatasi. Mereka dapat dan telah sering mengadakan kontak dengan media massa melalui perantaraan aneka organisasi non-pemerintah, lembaga sosial, keagamaan, bantuan hukum, atau individu cendekiawan.

Sebagai perantara, lembaga-lembaga non-pemerintah ini tak akan bertindak sebagai dewa penyelamat yang mampu menyelesaikan semua masalah kaum jelata. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak, mereka mengandalkan dukungan publik lewat dan dalam forum media massa. Pada akhirnya publik mengandalkan integritas profesional kaum jurnalis.

Dengan kerangka pemahaman demikian, kita dapat menimbang sejumlah gejala sosial politik yang mengikuti sebuah pola. Ketika ada seorang rohaniwan dijadikan sasaran kecaman politik karena dianggap melindungi beberapa buron kerusuhan 27 Juli, salah satu tindakan awal yang dilakukannya adalah mengadakan jumpa pers.

Pers juga masih mendapatkan kepercayaan dari para buron muda ini. Selain datang kepada tim relawan korban 27 Juli, untuk meminta pertolongan kemanusiaan darurat, para buron muda itu sendiri hanya mau berkomunikasi dengan jurnalis. Hampir semua media asing sempat mengadakan wawancara dengan mereka yang diuher-uber pihak yang berweneang.

Para pencari suaka yang mendatangi sejumlah gedung kedutaan besar asing di Indonesia melakukan hal serupa. Mereka tak semata-mata mengharap diberi suaka. Mereka berharap dapat bersuara dalam ruang publik lewat pertemuan dengan para wartawan di sekitar gedung.

Dengan alasan serupa kita dapat memahami larisnya halaman gedung parlemen di Indonesia sebagai tujuan persinggahan kaum demonstran. Para demonstran itu seakan datang untuk mengadu.

Sulit dipastikan sejauh mana mereka berharap lembaga yang mengklaim menjadi wakil rakyat itu mampu membantu mengatasi masalah ketidakadilan.

Karena belum jelas juga sejauh mana eksistensi lembaga itu mandiri dari ketidakadilan. Tapi para demonstran datang ke gedung itu untuk "pinjam tempat yang absah" untuk mengadakan pertemuan dengan para wartawan tanpa harus meminta izin polisi.

Di zaman Demokrasi Terpimpin, partai politik dan pertemuan di kalangan militer menjadi kekuatan-kekuatan yang tak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kepala negara. Kebangkitan Orde Baru merupakan hasil dari penyelesaian masalah itu.

Di tahun 1970-an, partai-par-

diapungkan. Tapi dalam dua dekade berikutnya ada dua kekuatan independen lain yang merisaukan birokrat negara: organisasi keagamaan dan gerakan mahasiswa.

Secara sistemik, keduanya ditundukkan dengan berhasil oleh negara. Sementara usia Orde Baru berlanjut, dan tenaganya menyusut jika dibandingkan tahun 1970-an, tantangan terhadapnya tak kunjung habis.

Kini muncul dua kelompok besar baru yang independen. Keduanya adalah anak kandung keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama, gerakan buruh industrial di kota dalam jumlah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya dalam seluruh sejarah republik ini. Ledakan gejala ini hanyalah bukti kebatanya perkembangan industri di Indonesia.

Kedua, berbagai lembaga swasta kelas menengah yang telah mengecap kue pembangunan ekonomi Orde Baru, tapi merasa aspirasinya tak tersalurkan. Mereka bergerak dalam berbagai bidang: hak asasi, demokratisasi, penegakan hukum, perlindungan lingkungan hidup, perempuan, intelektual, keagamaan, kesenian.

Profesionalisme jurnalis ikut memasuki periode baru dalam perubahan besar-besaran di Indonesia. Bagaimana sikap jurnalis sendiri? Intimidasi, diskriminasi, dipecat, atau dibuang bukanlah hal baru dalam sejarah kewartawanan Indonesia.

Profesi ini lahir justru dalam konteks yang penuh ancaman demikian.

Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah kewartawanan Indonesia, inilah zaman kelempahan dan kemewahan. Berbagai kemungkinan dan tawaran material siap menyerang para jurnalis yang silau oleh godaan materialisme.

Tentang ini kita telah banyak mendengar. Sampai-sampai kita sering mengabaikan sisi lainnya. Berbagai kasus penganiayaan terhadap wartawan mengingatkan kita, tak semua, mungkin tidak banyak, wartawan yang gampang dibeli dengan imbalan materi.

Mereka juga tak gentar menghadapi intimidasi dan terror dari oknum-oknum yang merasa bebas dari tata hukum. Perlakuan buruk terhadap wartawan mungkin tak akan terjadi seandainya semua wartawan kita hanya mengulas pornografi, atau menjadi juri bicara para pengusaha.

Kita bersedih dan kehilangan seorang profesional seperti Fuad Muhammad Syafruddin. Namun kepergian dan pengorbanan mereka membesarakan kita tentang masa depan bangsa ini.

Di antara kejadian-kejadian yang memprihatinkan di tanah air, masih ada orang-orang semacam mereka.

Masih terus berkobar semangat perjuangan bagi keadilan, kebenaran, dari pembelaan bagi mereka yang menjadi korban angkara murka, kerakusan materi, dan degradasi moral.

Ariel Heryanto PhD, pengamat sosial lulusan Monash University Australia.